

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH
(LAKIP)**

2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan



Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:



- a. Sekretaris Daerah

- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, kehutanan dan Perikanan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.



- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung serta analisis terhadap kondisi Kabupaten Lampung Barat, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Beberapa isu strategis di bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama antara lain adalah:
 - a. Pengendalian jumlah penduduk melalui KB dan pembangunan keluarga;
 - b. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia;
 - c. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. Peningkatan akses pelayanan kesehatan;



- e. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas;
 - f. Penguatan tata kelola pendidikan;
 - g. Peningkatan pendidikan keagamaan;
 - h. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
 - i. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - j. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga;
 - k. Pelestarian warisan budaya;
 - l. Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.
 - m. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan perlindungan perempuan;
 - n. Peningkatan kulaitas hidup dan tumbuh kembang anak;
 - o. Peningkatan perlindungan anak dan efektifitas kelembagaan perlindungan anak.
2. Bidang Ekonomi
- a. Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah;
 - b. Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah;
 - c. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan pariwisata;
 - e. Peningkatan ekonomi kreatif;
 - f. Peningkatan investasi;
 - g. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
 - h. Pengembangan kerja sama bidang ekonomi.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- a. Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah.
4. Bidang Hukum dan Birokrasi
- a. Kualitas penegakan hukum;
 - b. Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik.
5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
- a. Pembangunan data dan informasi geospasial;
 - b. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;



- c. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;
 - d. Ketersediaan tanah bagi pembangunan;
 - e. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - f. Pembangunan kawasan strategis;
 - g. Pembangunan daerah/desa tertinggal.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
- a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
 - b. Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi;
 - c. Diversifikasi dan konservasi energi;
 - d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.
7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a. Kemandirian pangan;
 - b. Pengembangan agribisnis;
 - c. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan peternakan;
 - d. Konservasi dan tata kelola hutan;
 - e. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

D. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 050/34/KPTS/SETDA/05/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.



Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah:
Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Secara Berkeadilan dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan;
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Amanah dengan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	C	C
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

**B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	a. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasatau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan	= (Jumlah kebijakan Subsektor yang terkelola : jumlah keseluruhan subsektor) x 100%	1. Mengimplementasi kan ketentuan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi Internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD, melalui rekrutmen Perangkat BUMD, diharapkan



				<p>Usaha Milik Daerah.</p> <p>c. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional.</p> <p>d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor: 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR.</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</p> <p>f. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 500/1018/Bangda tanggal 6 Maret Tahun 2019 tentang Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah Tahun 2018;</p> <p>g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.</p>		<p>dengan tatakelola perusahaan BUMD, system pengelolaan akan mampu mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>2. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah Nomor 54 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD, dan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi Internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.</p>
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:061/9454/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<p>Percepatan 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen perubahan 2. Penguatan Pengawasan 3. Penguatan akuntabilitas 4. Penguatan



						kelembagaan 5. Penguatan tata laksana 6. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara 7. Penguatan peraturan perundang-undangan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor:13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan LPPD dan IKK (Indikator Kinerja Kunci)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	80 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat C
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat Sangat Tinggi

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021



Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain:

a. Uraian Indikator Sasaran Strategis Sebelum Reviu

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Sumber Daya Alam dan Bidang Perekonomian	Persentase Kebijakan Strategis dibidang SDA yang ditindaklanjuti
		Persentase Kebijakan Strategis dibidang Ekonomi yang ditindaklanjuti
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)
5.	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

b. Uraian Indikator Sasaran Strategi Sesudah Reviu

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	20	40	60	80	100
2	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	C	C	C
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:



Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	a. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatandan Pemberhentian Anggota Dewan	=(Jumlah kebijakan Subsektor yang dikelola: jumlah keseluruhan subsektor) x 100%		1. Mengimplementasikan ketentuan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi Internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD, melalui rekrutmen Perangkat



				<p>Pengawasatau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>c. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional.</p> <p>d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor: 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR.</p>			<p>BUMD, diharapkan dengan tatakelola perusahaan BUMD, system pengelolaan akan mampu mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>2. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan memperhatikan</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



				<p>e. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</p> <p>f. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500/1018/Bangda tanggal 6 Maret Tahun 2019 tentang Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah Tahun 2018;</p>			<p>Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah Nomor 54 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD, dan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi Internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



				g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:061/9454/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Percepatan 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu: 1. Manajemen perubahan 2. Penguatan pengawasan 3. Penguatan akuntabilitas 4. Penguatan kelembagaan 5. Penguatan tata laksana



							6. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara 7. Penguatan peraturan perundang-undangan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Peraturan Pemerintah Nomor:13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri		Pedoman Penyusunan LPPD dan IKK (Indikator Kinerja Kunci)



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi



PERJANJIAN KINERJA SEKRETRIAT DAERAH TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Meningkatnya Koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.145.249.800,-	80 %
					Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah		71 %
					Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan		100 %
					Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat		Persentase Paket yang terselesaikan
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	Persentase Rekomendasi Kebijakan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Pengendalian Perekonomian yang di tindaklanjuti	716.758.100,-	80 %
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Cetak Buku Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat	Terlaksananya Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	231.982.600,-	40 Buku
		Jumlah Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)		Terlaksananya Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)		1 Dokumen	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring harga komoditi Kabupaten Lampung Barat	Jumlah terpantaunya data harga komoditi Kabupaten Lampung Barat	184.723.000,-	15 Kecamatan



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
				Telaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Buku Laporan TPAKD		20 Buku
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Rekrutmen Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD	Jumlah Dewan Pengawas BUMD yang terpilih	300.052.500,-	1 Orang
				Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Buku Laporan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		20 Buku
			Kegiatan Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Persentase Kebijakan Strategis dibidang Sumber Daya Alam yang ditindak lanjuti	Jumlah Kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah	397.578.500,-	5 Kebijakan
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersusunnya Dokumen Perjanjian LPP dan RKT (Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis)	Jumlah Dokumen Kerjasama LPP dan RKT	155.472.400,-	2 Dokumen
				Terdatanya kemitraan konservasi	Terdatanya calon kemitraan konservasi		100 %
				Terlaksananya koordinasi, monitoring dan sosialisasi pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertanian dan perikanan	Jumlah waktu koordinasi sosialisasi dalam rangka pemanfaatan pengembangan pengelolaan SDA Kehutanan, pertanian dan perikanan serta meningkatnya pengembangan dan pengawasan pengelolaan SDA Kehutanan, pertanian dan perikanan		43 %
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Alam Energi dan Air	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi dan Air	119.177.900,-	4 Kali



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup	122.928.200,-	1 kali
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah Paket yang terselesaikan	538.080.000,-	360 Paket
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah dievaluasi	163.921.000,-	360 Paket
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Barat	236.559.000,-	12 Bulan
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket yang dikonsultasikan	137.600.000,-	10 Paket
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang disediakan	492.833.200,-	6 Dokumen
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Laporan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan tiap Catur Wulan (Per 4 Bulan) dan Tahunan	78.470.000,-	4 Laporan



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
				Terlaksananya Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Cetak Buku Data Informasi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.		65 Eks
					Jumlah Cetak Buku Data Lokasi Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat		35 Eks
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Cetak Per Bulan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	329.663.200,-	128 Buku
		Jumlah Cetak Per Triwulan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat				64 Buku	
		Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (Pimpinan Rapat)				10 Eks	
		Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (OPD)				53 Eks	
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat	84.700.000,-	1 Dokumen
					Terlaksananya Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi					Predikat C



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah di Kabupaten Lampung Barat	Predikat Fungsi dan Peran Kelembagaan (berdasar Permendagri Nomor 99 Tahun 2012)	48.869.306.638,-	Predikat Sedang	
				Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		80 %	
				Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik		80 %	
				Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		80 %	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu		80 %	
			Kegiatan Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah PD yang memenuhi indikator penilaian PD dengan predikat sedang	716.683.500,-	14 PD	
					Jumlah PD yang memenuhi kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan tingkat kepatuhan sedang			14 PD
					Jumlah PD yang menyusun Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Nilai C			12 PD
			Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat	Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan SKM	299.899.000,-	4 Opd	
				Tersusunnya Survey Kebijakan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Survei Kebijakan Pelayanan Publik		1 Dokumen	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja	78.114.500,-	55 Eks
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi		60 Eks
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten	77.682.000,-	Predikat BB
					Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung barat yang disusun/dicetak		1 Laporan
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah PD yang terbina	108.260.000,-	5 PD
				Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Jumlah buku laporan		60 Eks
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	152.728.000,-	1 Dokumen
				Terlaksananya Penyusunan Peraturan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Cetak Buku Peraturan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah		45 Buku
			Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	3.896.591.800,-	5 Kegiatan
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya dokumentasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan dokumentasi pimpinan	303.332.000,-	100 Kali



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah pertemuan dan Dialog dengan masyarakat	2.899.913.800,-	136 Kali
				Terlaksananya perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten lampung barat	Jumlah perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten lampung barat		100 Kali
				Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		50 Kali
			Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Terlaksananya operasional keprotokolan	Jumlah cetak dan penggandaan plakat	693.346.000,-	220 Buah
				Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas Pimpinan dan Protokol		120 Stel
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerahnya	3.258.426.400,-	12 Bulan
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	256.206.500,-	9 Jenis
					Jumlah alat listrik dan elektronik		1.365 Buah
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Piring/gelas/mangkok/cangkir/ sendok/garpu/pisau	116.965.000,-	3 Set
					Jumlah Peralatan Masak		3 Jenis
				Terlaksananya pengadaan komputer/jaringan komputer	Jumlah Laptop/note book		2 Unit
					Jumlah Printer		2 Unit



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah isi ulang gas	27.300.000,-	156 Tabung	
					Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran			3 Tabung
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	167.038.900,-	20 Jenis	
					Jumlah Jenis Penggandaan			5 Jenis
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU)	523.080.000,-	19 SKHU	
					Jumlah Surat Kabar Mingguan (SKM)			30 SKM
					Jumlah Majalah			5 Media
					Jumlah Surat Kabar Nasional			3 Media
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum tamu (pemda)	702.908.000,-	15.220 Kotak	
					Tersedianya sewa gedung, rumah dan kamar penginapan	Jumlah gedung yang disewa		40 Unit
						Jumlah penginapan yang di sewa		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.464.928.000,-	243 Orang/ Paket	
					Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah		360 Orang/ Paket
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	1.073.550.000,-	12 Bulan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	549.750.000,-	12 Bulan	



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	433.900.000,-	12 Bulan
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	89.900.000,-	12 Bulan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.826.560.000,-	12 Bulan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai dan benda pos	22.250.000,-	2.000 Lembar
					Jumlah paket/pengiriman		100 Paket
				Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah		34 Orang
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon	981.900.000,-	26 Rekening
					Jumlah rekening Air		7 Rekening
					Jumlah rekening Listrik		11 Rekening
				Tersedianya jasa TV Berbayar, internet dan sandi	Jumlah saluran TV Berbayar		11 Stasiun radio
					Jumlah rekening internet yang di sewa		12 bulan
					Jumlah frekuensi radio yang di sewa		1 Rekening
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa kursi	230.000.000,-	5.000 Unit
					Jumlah sewa tenda		200 Unit
					Jumlah sewa sound system		40 Unit



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Buku cek dan rekening koran	Jumlah buku cek	592.410.000,-	6 Buku	
					Jumlah cetak rekening koran			60 Lembar
					Jumlah Area kebersihan kantor			8 Area
				Tersedianya jasa administrasi perkantoran/ teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran		18 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.643.412.900,-	12 Bulan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	178.561.000,-	2 Unit	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	Jumlah meja kerja yang di pelihara	30.800.000,-	13 Unit	
					Jumlah meja rapat yang di pelihara			2 Unit
					Jumlah meja makan yang di pelihara			5 Set
					Jumlah kursi kerja yang di pelihara			16 Unit
					Jumlah kursi rapat yang di pelihara			5 Unit



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Jumlah sumur bor	179.485.000,-	4 Unit	
						Jumlah tv		1 Unit
						Jumlah parabola		1 Unit
						Jumlah genset		3 Unit
					Terpeliharanya rumah jabatan	Jumlah genset yang di pelihara		3 Unit
					Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah sound system		2 Unit
						Jumlah genset		3 Unit
						Jumlah mesin potong rumput		8 Unit
				Jumlah pompa air			1 Unit	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	689.177.900,-	2 Gedung	
					Terpeliharanya rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang di pelihara		2 Gedung
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa kir kendaraan	1.565.389.000,-	20 Unit	
						Jumlah registrasi kendaraan bermotor		10 Unit
					Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang di rusak berat		2 Unit
						Jumlah Motor yang dipelihara		31 Unit
						Jumlah Mobil yang dipelihara		37 Unit
						Jumlah Truck/Bus yang dipelihara		3 Unit
					Jumlah Jet sky yang dipelihara		3 Unit	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	730.064.580,-	14 Unit	



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja	29.400.000,-	1 Unit
					Jumlah Kursi Kerja		4 Unit
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Mobil Yang disewa	700.664.580,-	108 Unit
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH /WKDH	781.593.457,-	12 Bulan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah orang yang dibayarkan General chek up	49.400.000,-	2 Orang
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	170.888.457,-	2 Orang
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	161.305.000,-	46 Stel



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan dana penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	400.000.000,-	2 Orang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	33.873.608.901,-	3 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	14.926.500,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan keuangan Prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan Prognosis realisasi anggaran	12.668.000,-	1 Laporan
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	12.754.000,-	1 Laporan
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	33.833.260.401,-	627 Orang



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	68.815.100,-	7 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.255.100,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	6.827.500,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	11.020.000,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	8.872.500,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	7.060.000,-	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5.370.000,-	1 Dokumen



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	15.410.000,-	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					Predikat Sangat Tinggi
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.574.413.900,-	80 %
				Meningkatnya fasilitasi dan Pembinaan bidang keagamaan, Sosial, dan kemasyarakatan	Persentase Tempat Peribadatan yang dibantu		80 %
					Persentase Lembaga Keagamaan yang dibantu		80 %
					Persentase Guru Ngaji, Marbot dan imam Masjid yang diberi insentif		80 %
					Meningkatnya Persentase Produk Hukum Yang Terbentuk	Persentase Produk Hukum yang terbentuk	
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Yang Efektif	Terlaksananya Admnistrasi Tata Pemerintahan Yang Efektif	939.430.900,-	7 Laporan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten Lampung Barat	240.437.900,-	15 Kecamatan
				Terlaksananya Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah		1 Dokumen
				Terselesaikannya Status Pekon Sukapura	Jumlah laporan penyelesaian status pekon Sukapura		3 Laporan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusun nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Buku LPPD	154.592.000,-	40 Eks



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
				Tersusun nya Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Suplemen LPPD		40 Eks
				Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI)	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi APKASI		6 Kali
				Tersusunnya Pencapaian SPM	Jumlah Dokumen SPM		50 Eks
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar di Kabupaten Lampung Barat	544.401.000,-	12 Kegiatan
				Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan		12 Kali
					Jumlah Buku Laporan Bulanan		60 Eks
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	28.255.000,-	8 Kali
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Kerjasama Daerah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Daerah	28.255.000,-	1 Dokumen
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	7.128.574.000,-	21 Kegiatan



Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan dibidang Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan rangkaian Ramadhan Idul Fitri dan Adha	6.816.007.000,-	15 Kali	
					Jumlah Rangkaian Open House Idul Fitri			3 Kali
					Jumlah Rangkaian Open House Idul Adha			3 Kali
					Jumlah yasinan			19 Kali
					Jumlah PHBI			3 Kali
					Jumlah Safari Jumat			19 Kali
					Jumlah Pengajian Pekon			19 Kali
					Jumlah Pengajian Istigosah			1 Kali
					Jumlah Guru Ngaji			408 Orang
					Jumlah Imam Masjid			136 Orang
					Jumlah Marbot			136 Orang
					Jumlah Intensif Hafiz			15 Orang
					Jumlah Peserta Haji			700 Orang
					Jumlah Peserta Umroh			100 Orang
					Jumlah Peserta Wisata Rohani			4 Orang
					Jumlah pelaksanaan survei			1 Kali
			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB			2 Kali		
			Jumlah Penyaluran Hibah bidang Keagamaan			37 Paket		
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan dibidang Sosial	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS/UKS)	267.685.000,-	30 Sekolah	
					Jumlah Lembaga Keagamaan Penerima Hibah yang termonitor dan Terbina			80 Lembaga



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan dibidang Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan pemuda dan olahraga	44.882.000,-	2 Kali
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	478.154.000,-	1 Laporan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	173.747.000,-	10 Perda
				Meningkatnya Kualitas Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya		35 Perbup
					Jumlah Keputusan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya		350 SK
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Meningkatnya Pengetahuan OPD Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dipublikasikan Pada OPD	126.421.000,-	25 Produk Hukum
				Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang di publikasikan dalam website JDIH		395 Produk Hukum
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap HAM	Jumlah Data Pendukung Capaian Ranham Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah Sesuai Prosedur	177.986.000,-	20 %
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN						59.588.970.338,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor: 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi;
- Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Predikat Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan



sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	80	88,68	110.00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	0	0.00
3	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	0	0.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan, dengan capaian kinerja 110 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja 0 % dikarenakan menunggu hasil penilaian Evaluator Kemenpan RB, pada indikator Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dengan capaian kinerja 0 % dikarenakan masih menunggu tahapan validasi LPPD oleh Tim Daerah dan Tim Pusat Kemendagri.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dari sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	80	88,68	110.00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	0	0.00
3	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	0	0.00



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	66.67 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	80 %	88,68 %	110 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat C	0	0 %
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat Sangat Tinggi	0	0 %

Dari sebanyak (tiga) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 4	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00
	Jumlah	3	1	33.33	0	0.00	2	66.67

Dari sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	110.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 4	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	100.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 (tiga) sasaran dan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dari sebanyak 2 (dua) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	20	20	100	40	40	100	60	60	100	80	88,68	110



Tabel 3.6.1
Pencapaian Indikator Sasaran 1 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2020	Realisasi s/d Tahun 2021	Capaian
1	Persentase Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	60	88,68	88,68

Sasaran Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu: "Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan". Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan" adalah sebesar 88,68 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan" tahun ini meningkat 110.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 60.00 Poit. Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 (satu) "Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan" tahun ini adalah sebesar 110.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 88.68 %. Adapun Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 Bagian Perekonomian telah melaksanakan Rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Limau Kunci Kab. Lam-Bar telah selesai dilaksanakan dan Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat.
2. Petugas survei dan Penginput data harga komoditi Pasar (SIHK) setiap minggunya melaporkan hasil survei yang dilaksanakan di setiap kecamatan.
3. Di Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan hasil pendataan lapangan sampai dengan Desember Tahun 2021, Jumlah Data Pelaku ekonomi tercatat sebanyak 6.672 Pelaku Ekonomi.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini antara lain:



1. Rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat telah selesai dilaksanakan dan telah diumumkan di Web <https://lampungbaratkab.go.id>.
2. Jasa Notaris Penyesuaian bentuk Hukum BUMD PT. Perseroda Pesagi Mandiri akan dilaksanakan melalui Perubahan mendahului pada Tahun Anggaran 2022.
3. Melakukan pembinaan manajemen dan keuangan bagi para pelaku ekonomi, memperkenalkan peralatan modern yang memadai bagi para pelaku ekonomi dalam operasional kegiatan usahanya dan membentuk wadah bagi para pelaku ekonomi seperti asosiasi dan badan lain yang dapat berdiri sendiri dan tidak memberatkan pelaku ekonomi itu sendiri.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	0	0	0.00	C	CC	100	C	0	0.00	C	0	0.00

Tabel 3.7.1
Pencapaian Indikator Sasaran 2 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2021	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	100 %



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Indeks Reformasi Birokrasi " adalah sebesar 0 dari target sebesar C yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Indeks Reformasi Birokrasi " tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00 point.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 (satu) "Indeks Reformasi Birokrasi" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100 % dikarenakan pada tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah 54,25 atau kategori "CC" termasuk dalam kategori Sangat Baik;

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	0	0	Sangat Tinggi	0	0	Sangat Tinggi	0	0

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)" adalah sebesar 0 dari target Predikat Sangat Tinggi yang direncanakan dalam



Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 (satu) "Predikat Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)" tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00 Point.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 (empat) renstra, capaian kinerja indikator 1 (satu) "Predikat Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100 % dikarenakan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 pencapaian dengan Skor 3,3059 dan Status Kinerja Sangat Tinggi.

**ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA****A. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.145.249.800,- terealisasi sebesar Rp.2.049.446.045,- atau setara dengan 95,53%. Indikator dari Program Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

- Persentase Meningkatnya Koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 80 % terealisasi 80 % dengan persentase capaian (100 %);
- Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 71% terealisasi sebesar 71% dengan persentase capaian (100 %);
- Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 % terealisasi sebesar 100 % dengan persentase capaian (100 %);
- Persentase Paket Yang terselesaikan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 97 % terealisasi melebihi target yaitu sebesar 194 % dengan persentase capaian (200 %).

Capaian Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan didukung oleh beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.

Uraian		Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	716.758.100,-	635.627.225,-	88,68 %
Output (Indikator Kegiatan)	Persentase Rekomendasi Kebijakan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Pengendalian	80 %	80 %	100 %



	Perekonomian yang di tindaklanjuti			
--	------------------------------------	--	--	--

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	231.982.600,-	231.615.100,-	99,84 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Cetak Buku Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat	40 Buku	40 Buku	100 %
	Jumlah Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	231.982.600,-	231.615.100,-	99,84 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah terpantaunya data harga komoditi Kabupaten Lampung Barat	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100 %



	Jumlah tersusunnya Buku TPID	20 Buku	20 Buku	100 %
	Jumlah Buku Laporan TPAKD	20 Buku	20 Buku	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	231.982.600,-	231.615.100,-	99,84 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dewan Pengawas BUMD yang terpilih	1 orang	1 orang	100 %
	Jumlah Buku Laporan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Buku	20 Buku	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

2. Kegiatan Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	397.578.500,-	392.600.520,-	98,75 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah	5 kebijakan	5 kebijakan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	155.472.400,-	154.543.480,-	99,40 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Kerjasama LPP dan RKT	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Terdatanya calon kemitraan konservasi	100 %	100	100 %
	Jumlah waktu koordinasi sosialisasi dalam rangka pemanfaatan pengembangan pengelolaan SDA Kehutanan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan pengembangan dan pengawasan pengelolaan SDA Kehutanan, pertanian dan perikanan	43 %	43 %	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	119.177.900,-	117.557.640,-	98,64 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi dan Air	4 Kali	4 Kali	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	122.928.200,-	120.499.400,-	98,02 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Kali	1 Kali	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	538.080.000,-	536.467.100,-	99,70 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Paket yang terselesaikan	360 Paket	700 Paket	194,44 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terealisasi sesuai melebihi target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	163.921.000,-	163.875.200,-	99,97 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah dievaluasi	360 Paket	700 Paket	194,44 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	236 559.000,-	235.994.800,-	99,76 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Terlaksananya Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Barat	12 Bulan	12 Bulan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	137.600.000,-	136.597.100,-	99,27 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Paket yang dikonsultasikan	10 Paket	11 Paket	110 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi melebihi target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

4. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	492.833.200,-	484.751.200,-	98,36 %
Output (Indikator Kegiatan)	Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	78.470.000,-	78.440.000,-	99,96 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Laporan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan tiap	4 Laporan	4 Laporan	100 %



	Catur Wulan (Per 4 Bulan) dan Tahunan			
	Jumlah Cetak Buku Data Informasi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.	65 Eks	65 Eks	100 %
	Jumlah Cetak Buku Data Lokasi Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat	30 Eks	30 Eks	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	329.663.200,-	322.722.200,-	97,89 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Cetak Per Bulan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	128 Buku	128 Buku	100 %
	Jumlah Cetak Per Triwulan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	64 Buku	64 Buku	100 %



	Pembangunan Kabupaten Lampung Barat			
	Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (Pimpinan Rapat)	10 Buku	10 Buku	100 %
	Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (OPD)	53 Eks	53 Eks	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	84.700.000,-	83.589.000,-	98,69 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Jumlah Dokumen Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Program sebesar Rp. 48.869.306.638,- terealisasi sebesar Rp. 46.046.956.333,- atau setara dengan 94,22 % dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Predikat Fungsi dan Peran Kelembagaan (berdasar Permendagri Nomor 99 Tahun 2012) dengan target kinerja pada tahun 2021 Predikat Sedang dan terealisasi Predikat Sedang dengan persentase capaian 100 %;
- Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan target kinerja pada tahun 2021 80 % dan terealisasi 80 % dengan persentase capaian kinerja 100 %;
- Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik dengan target kinerja tahun 2021 80 % dan terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %;
- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dengan target kinerja tahun 2021 80 % dan terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %;
- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu dengan target kinerja tahun 2021 80 % terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan Penataan Organisasi.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	716.683.500,-	715.407.200,-	99,82 %
Output (Indikator	Jumlah PD yang memenuhi indikator	15 PD	15 PD	100 %



<i>Kegiatan)</i>	penilaian PD dengan predikat sedang			
	Jumlah PD yang memenuhi kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan tingkat kepatuhan sedang	15 PD	15 PD	100 %
	Jumlah PD yang menyusun Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Nilai C	12 PD	12 PD	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Penataan Organisasi, terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	299.899.000,-	299.761.700,-	99,95 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan SKM	4 PD	4 PD	100 %
	Jumlah Dokumen Survei Kebijakan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**b. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	78.114.500,-	77.927.300,-	99,76 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja	55 Eks	55 Eks	100 %
	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	60 Eks	60 Eks	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	77.682.000,-	77.404.200,-	99,64 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten	Predikat BB	0	0
	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung barat yang disusun/dicetak	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten dengan target kinerja Predikat BB, belum terealisasi dikarenakan Menunggu hasil Evaluasi dari Kemenpan RB berkaitan dengan Nilai Evaluasi SAKIP.

d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	108.260.000,-	108.242.000,- (99,98 %)	98,98 %
Output (Indikator)	Jumlah PD yang terbina	5 PD	5 PD	100 %



<i>Sub Kegiatan)</i>	Jumlah buku laporan	60 Eks	60 Eks	100 %
----------------------	---------------------	--------	--------	-------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana terealisasi sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja.

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	152.728.000,-	152.072.000,-	99,57 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Jumlah Cetak Buku Peraturan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	45 Buku	45 Buku	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan terealisasi sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja.

2. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	3.896.591.800,-	3.895.845.947,-	99,98 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**a. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	303.332.000,-	303.057.000,-	99,91 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah pelaksanaan dokumentasi pimpinan	100 Kali	133 Kali	133 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	2.899.913.800,-	2.899.862.947,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah pertemuan dan Dialog dengan masyarakat	136 Kali	136 Kali	100 %
	Jumlah perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten lampung barat	100 Kali	141 Kali	141 %
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	50 Kali	57 Kali	114 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan terealisasi melebihi target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	693.346.000,-	692.926.000,-	99,94 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah cetak dan penggandaan plakat	220 Buah	220 Buah	100 %
	Jumlah jenis pakaian dinas Pimpinan dan Protokol	120 Stel	120 Stel	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan terealisasi melebihi target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	3.258.426.400,-	3.253.990.975,-	99,86 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	256.206.500,-	253.486.000,-	98,94 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah alat listrik dan elektronik	1.365 Buah	1.365 Buah	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Uraian	Uraian	Target	Capaian	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	116.965.000,-	116.965.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3 Set	3 Set	100 %
	Jumlah Laptop/note book	2 Unit	2 Unit	100 %
	Jumlah Printer	2 Unit	2 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	27.300.000,-	27.300.000-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah isi ulang gas	156 Tabung	156 Tabung	100 %
	Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran	3 Tabung	3 Tabung	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	167.038.900,-	165.737.700-	99,22 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Jenis Cetakan	20 Jenis	20 Jenis	100 %
	Jumlah Jenis Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	523.080.000,-	523.080.000-	100 %
Output (Indikator Sub)	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU)	19 SKHU	19 SKHU	100 %



<i>Kegiatan)</i>	Jumlah Surat Kabar Mingguan (SKM)	30 SKM	30 SKM	100 %
	Jumlah Majalah	5 Media	5 Media	100 %
	Jumlah Surat Kabar Nasional	3 Media	3 Media	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	702.908.000,-	702.520.000,-	99,94 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah makan minum tamu (pemda)	15.220 kotak	15.220 kotak	100 %
	Jumlah gedung yang disewa	40 Unit	40 Unit	100 %
	Jumlah penginapan yang di sewa	160 Unit	160 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	1.464.928.000,-	1.464.902.275,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah bulan pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	243 orang/paket	243 orang/paket	100 %



	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	360 orang/paket	360 orang/paket	100 %
--	--	-----------------	-----------------	-------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

4. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	1.073.550.000,-	1.073.540.000,-	100 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah bulan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	549.750.000,-	549.750.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	433.900.000,-	433.900.000-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	89.900.000,-	89.890.000-	99,99 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	1.826.560.000,-	1.544.409.430,-	84,55 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	22.250.000,-	15.000.000,-	67,42 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah perangko, materai dan benda pos	2.000 Lembar	2.000 Lembar	100 %
	Jumlah paket/pengiriman	100 Paket	0 Paket	0 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Jumlah Paket/Pengiriman tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan tidak adanya kebutuhan pengiriman/paket.

**b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	981.900.000,-	740.011.930-	75,37 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah rekening telpon	26 Rekening	26 Rekening	100 %
	Jumlah rekening Air	7 Rekening	7 Rekening	100 %
	Jumlah rekening Listrik	11 Rekening	11 Rekening	100 %
	Jumlah rekening internet yang di sewa	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Jumlah frekuensi radio yang di sewa	1 Rekening	1 Rekening	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	230.000.000,-	215.000.000,-	93,48 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah sewa kursi	5.000 Unit	5.000 Unit	100 %
	Jumlah sewa tenda	200 Unit	200 Unit	100 %
	Jumlah sewa sound system	40 Unit	40 Unit	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	592.410.000,-	574.397.500,-	96,96 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah buku cek	6 Buku	3 Buku	50 %
	Jumlah cetak rekening koran	60 Lembar	3 Lembar	5 %
	Jumlah Area kebersihan kantor	8 Area	8 Area	100 %
	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	18 Orang	18 Orang	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Jumlah Buku Cek dan Jumlah Cetak Rekening Koran tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Buku Cek dan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran.

6. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	2.643.412.900,-	2.560.011.705,-	96,84 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	178.561.000,-	175.473.400,-	98,27 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	30.800.000,-	0.00	0.00 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah meja kerja yang di pelihara	13 Unit	0 Unit	0 %
	Jumlah meja rapat yang di pelihara	2 Unit	0 Unit	0 %
	Jumlah meja makan yang di pelihara	5 Set	0 Set	0 %
	Jumlah kursi kerja yang di pelihara	16 Unit	0 Unit	0 %
	Jumlah kursi rapat yang di pelihara	5 Unit	0 Unit	0 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan masa ekonomis aset tetap (mebel) belum memerlukan perbaikan, kondisi aset masih dalam keadaan bagus, sehingga anggaran tidak digunakan. Wujud dari kepedulian supaya penyerapan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	179.485.000,-	158.305.450,-	88,20 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah sumur bor	4 Unit	4 Unit	100 %
	Jumlah tv	1 Unit	1 Unit	100 %
	Jumlah parabola	1 Unit	1 Unit	100 %
	Jumlah genset	3 Unit	3 Unit	100 %
	Jumlah genset yang di pelihara	3 Unit	3 Unit	100 %
	Jumlah sound system	2 Unit	2 Unit	100 %
	Jumlah mesin potong rumput	4 Unit	4 Unit	100 %
	Jumlah pompa air	1 Unit	1 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	689.177.900,-	681.816.900,-	98,93 %
Output (Indikator)	Jumlah gedung kantor yang	2 Gedung	2 Gedung	100 %



<i>Sub Kegiatan)</i>	terpelihara			
	Jumlah rumah jabatan yang di pelihara	3 Gedung	3 Gedung	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	1565389000,-	1544415955,-	98,66 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah jasa kir kendaraan	20 Unit	12 Unit	60 %
	Jumlah registrasi kendaraan bermotor	10 Unit	5 Unit	10 %
	Jumlah Kendaraan Dinas /operasional yang di rusak berat	2 Unit	2 Unit	100 %
	Jumlah Motor yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	100 %
	Jumlah Mobil yang dipelihara	37 Unit	37 Unit	100 %
	Jumlah Truck/Bus yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100 %
	Jumlah Jet sky yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Indikator:

1. Indikator “Jumlah jasa kir kendaraan” terealisasikan tidak mencapai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Jasa Kir kendaraan dinas operasional.
2. Indikator “Jumlah registrasi kendaraan bermotor” terealisasikan tidak mencapai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan sesuai jumlah kebutuhan kendaraan yang memerlukan registrasi ulang.

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	730.064.580,-	682.800.000,-	93,53 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	14 Unit	14 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	29.400.000,-	29.400.000,-	100 %
Output (Indikator)	Jumlah Meja Kerja	1 Unit	1 Unit	100 %



<i>Sub Kegiatan)</i>	Jumlah Kursi Kerja	4 Unit	4 Unit	100 %
----------------------	--------------------	--------	--------	-------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Mebel terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	700.664.580,-	653.400.000,-	93,25 %
Output (<i>Indikator Sub Kegiatan)</i>	Jumlah Mobil Yang disewa	9 Unit	9 Unit	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	781.593.457,-	758.566.642,-	97.05 %
Output (<i>Indicator Kegiatan)</i>	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH /WKDH	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.



a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	49.400.000,-	38.000.000,-	76,92 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah orang yang dibayarkan General chek up	2 Orang	2 Orang	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	170.888.457,-	159.261.642,-	93,20 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah orang yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	2 Orang	2 Orang	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.



c. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	161.305.000,-	161.305.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	46 Stel	46 Stel	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	400.000.000,-	400.000.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Penyediaan dana penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	2 Orang	2 Orang	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	33.873.608.901,-	31.493.569.334,-	92.97 %
Output (Indikator Kegiatan)	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	14.926.500,-	14.926.500,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	12.668.000,-	12.668.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah dokumen laporan keuangan Prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	12.754.000,-	12.754.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**d. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	33.833.260.401,-	31.453.220.834,-	92,97 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya	627 Orang	627 Orang	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

10. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	68.815.100,-	68.815.100,-	100 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	14.255.100,-	14.255.100,-	100 %



Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
--	--	-----------	-----------	-------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	6.827.500,-	6.827.500,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	11.020.000,-	11.020.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	8.872.500,-	8.872.500,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	7.060.000,-	7.060.000,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	5.370.000,-	5.370.000,-	100 %



Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
--	--	-----------	-----------	-------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	15.410.000,-	15.410.000,-,-	100 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

C. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pagu Program sebesar Rp. 8.574.413.900,- terealisasi sebesar Rp. 7.983.667.205,- atau setara dengan 93,11 % dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Indikator 1 “Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” dengan target kinerja pada tahun 2021 80 % terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %;
- Indikator 2 “Persentase Tempat Peribadatan Yang Dibantu” dengan target kinerja pada tahun 2021 80 % terealisasi 75 % dengan persentase capaian 93,75 % dikarenakan Paket hibah yang realisasinya belum maksimal adalah hibah listrik rumah ibadah, hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan pencairan hibah yang



harus dipenuhi dan jauhnya jarak tempuh antara lokasi penerima hibah dengan pemerintah daerah. Selain itu disebabkan oleh nominal hibah listrik tidak sebanding dengan biaya pengurusannya;

- Indikator 3 “Persentase Lembaga Keagamaan Yang Dibantu” dengan target kinerja pada tahun 2021 80 % terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %;
- Indikator 4 “Persentase Guru Ngaji, Marbot dan Imam Masjid Yang Diberi Insentif” dengan target kinerja pada tahun 2021 80 % terealisasi 80 % dengan persentase capaian 100 %;
- Indikator 5 “Persentase Produk Hukum Yang Terbentuk” dengan target kinerja pada tahun 2021 100 % terealisasi 100 % dengan persentase capaian 100 %;

Capaian Indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung oleh beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	939.430.900,-	929.047.200,-	98,89 %
Output (Indikator Kegiatan)	Terlaksananya Admnistrasi Tata Pemerintahan Yang Efektif	7 Laporan	7 Laporan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	240.437.900,-	236.070.000,-	98,18 %
Output (Indikator)	Jumlah Data Pembakuan Nama Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100 %



<i>Sub Kegiatan)</i>	Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten Lampung Barat			
	Jumlah Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Jumlah laporan penyelesaian status pekon Sukapura	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	154.592.000,-	153.322.600,-	99,18 %
<i>Output (Indikator Sub Kegiatan)</i>	Jumlah Buku LPPD	40 Eks	40 Eks	100 %
	Jumlah Buku Suplemen LPPD	40 Eks	40 Eks	100 %
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi APKASI	6 Kali	7 Kali	116,67 %
	Jumlah Dokumen SPM	50 Eks	50 Eks	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

**c. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	544.401.000,-	539.654.600,-	99,13 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar di Kabupaten Lampung Barat	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan	12 Kali	12 Kali	100 %
	Jumlah Buku Laporan Bulanan	60 Eks	60 Eks	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

2. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	28.255.000,-	28.151.000,-	99,63 %
Output (Indikator Kegiatan)	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	8 Kali	8 Kali	100 %

Keterangan:



Realisasi target kinerja Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah, terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	28.255.000,-	28.151.000,-	99,63 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	7.128.574.000,-	6.550.096.890,-	91,89 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	21 Kegiatan	19 Kegiatan	90,48 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terealisasikan tidak sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Umroh dan Wisata Rohani dan Fasilitas Pemberangkatan Haji sesuai surat resmi dari Kementerian Agama RI.



a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	6.816.007.000,-	6.325.119.890,-	92,80 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Pelaksanaan rangkaian Ramadhan Idul Fitri dan Adha	15 Kali	15 Kali	100 %
	Jumlah Rangkaian Open House Idul Fitri	2 Kali	2 Kali	100 %
	Jumlah Rangkaian Open House Idul Adha	2 Kali	2 Kali	100 %
	Jumlah yasinan	19 Kali	19 Kali	100 %
	Jumlah PHBI	3 Kali	3 Kali	100 %
	Jumlah PHBI	19 Kali	19 Kali	100 %
	Jumlah Pengajian Pekon	19 Kali	19 Kali	100 %
	Jumlah Guru Ngaji	408 Orang	408 Orang	100 %
	Jumlah Imam Masjid	136 Orang	136 Orang	100 %
	Jumlah Marbot	136 Orang	136 Orang	100 %
	Jumlah Intensif Hafiz	15 Orang	15 Orang	100 %
	Jumlah pelaksanaan survei	1 Kali	1 Kali	100 %
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB	2 Kali	2 Kali	100 %



	Jumlah Penyaluran Hibah bidang Keagamaan	37 Paket	35 Kali	94,59 %
--	--	----------	---------	---------

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja, hanya pada Indikator “Jumlah Penyaluran Hibah bidang Keagamaan” dari Target 37 Paket terealisasikan 35 Paket dikarenakan Paket hibah yang realisasinya belum maksimal adalah hibah listrik rumah ibadah. hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan pencairan hibah yang harus dipenuhi dan jauhnya jarak tempuh antara lokasi penerima hibah dengan Pemerintah Daerah. selain itu disebabkan oleh nominal hibah listrik tidak sebanding dengan biaya pengurusannya. sehingga banyak pengurus rumah ibadah yang tidak mengurus pencairan.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	267.685.000,-	184.845.000,-	69,05 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Pembinaan UKS termonitor di 15 Kecamatan Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP)	30 Sekolah	30 Sekolah	100 %
	Jumlah Lembaga Keagamaan Penerima Hibah yang termonitor dan Terbina	80 Lembaga	80 Lembaga	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran 69,05 % dikarenakan Lomba Sekolah Sehat (LSS)-UKS tidak diserap karena di tingkat provinsi tidak dilaksanakan penilaian LSS, namun monitoring dan pembinaan UKS tetap dilaksanakan ke 30 sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	44.882.000,-	40.132.000,-	89,42 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan pemuda dan olahraga	2 Kali	2 Kali	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	478.154.000,-	476.372.115,-	99,63 %
Output (Indikator Kegiatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100 %

**Keterangan:**

Realisasi target kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terealisasikan sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	173.747.000,-	173.703.000,-	99,97 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan pemuda dan olahraga Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	10 Perda	13 Perda	130 %
	Jumlah Peraturan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	35 Perbup	70 Perbup	200 %
	Jumlah Keputusan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	350 SK	466 SK	117,97

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah terealisasikan melebihi target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan meningkatnya kebutuhan Perda, Perbup dan SK.

**b. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	126.421.000,-	125.044.715,-	98,91 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dipublikasikan Pada OPD	25 Produk Hukum	25 Produk Hukum	100 %
	Jumlah produk hukum yang di publikasikan dalam website JDIH	395 Produk Hukum	466 Produk Hukum	117,97 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.

c. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Uraian	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan	177.986.000,-	177.624.400,-	99,80 %
Output (Indikator Sub Kegiatan)	Jumlah Data Pendukung Capaian Ranham Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah Sesuai Prosedur	20 Persen	20 Persen	100 %

Keterangan:

Realisasi target kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum terealisasi sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja.



Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 SEKRETARIAT DAERAH

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan									
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	716.758.100.00	102.940.400.00	14.36	196.781.425.00	27.45	258.863.825.00	36.12	635.627.225.00	88.68
1.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	492.833.200.00	60.446.800.00	12.27	196.350.100.00	39.84	282.138.000.00	57.25	484.751.200.00	98.36
1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	538.080.000.00	109.890.000.00	20.42	197.585.200.00	36.72	239.521.200.00	44.51	536.467.100.00	99.7
1.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	397.578.500.00	66.447.500.00	16.71	119.075.600.00	29.95	176.342.800.00	44.35	392.600.520.00	98.75
Total Per Sasaran		2.145.249.800.00	339.724.700.00	15.84	709.792.325.00	33.09	956.865.825.00	44.60	2.049.446.045.00	95.53
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien									
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.815.100.00	9.089.000.00	13.21	22.536.000.00	32.75	36.529.500.00	53.08	68.815.100.00	100



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.873.608.901.00	7.347.812.488.00	21.69	17.793.863.354.00	52.53	24.470.593.183.00	72.24	31.493.569.334.00	92.97
	2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.258.426.400.00	439.436.691.00	13.49	1.272.839.107.00	39.06	2.397.042.613.00	73.56	3.253.990.975.00	99.86
	2.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.064.580.00	25.000.000.00	3.42	242.800.000.00	33.26	460.600.000.00	63.09	682.800.000.00	93.53
	2.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.560.000.00	246.210.195.00	13.48	618.605.090.00	33.87	1.008.621.239.00	55.22	1.544.409.430.00	84.55
	2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.643.412.900.00	280.861.830.00	10.62	1.196.195.118.00	45.25	1.597.267.490.00	60.42	2.560.011.705.00	96.84
	2.7 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	781.593.457.00	356.434.599.00	45.6	596.307.444.00	76.29	657.937.043.00	84.18	758.566.642.00	97.05
	2.8 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.073.550.000.00	181.423.000.00	16.9	419.356.000.00	39.06	690.383.000.00	64.31	1.073.540.000.00	100
	2.9 Penataan Organisasi	716.683.500.00	72.704.100.00	10.14	178.473.100.00	24.9	237.525.100.00	33.14	715.407.200.00	99.82



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.896.591.800.00	747.097.100.00	19.17	1.935.647.350.00	49.68	2.786.704.150.00	71.52	3.895.845.947.00	99.98
Total Per Sasaran		48.869.306.638.00	9.706.069.003.00	19.86	24.276.622.563.00	49.68	34.343.203.318.00	70.28	46.046.956.333.00	94.22
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	3.1 Administrasi Tata Pemerintahan	939.430.900.00	111.857.200.00	11.91	261.988.890.00	27.89	490.859.516.00	52.25	929.047.200.00	98.89
	3.2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.128.574.000.00	94.225.000.00	1.32	1.705.969.500.00	23.93	2.999.849.500.00	42.08	6.550.096.890.00	91.89
	3.3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	478.154.000.00	83.264.715.00	17.41	242.568.115.00	50.73	343.020.615.00	71.74	476.372.115.00	99.63
	3.4 Fasilitasi Kerjasama Daerah	28.255.000.00	2.215.000.00	7.84	2.215.000.00	7.84	22.533.000.00	79.75	28.151.000.00	99.63
Total Per Sasaran		8.574.413.900.00	291.561.915.00	3.40	2.212.741.505.00	25.81	3.856.262.631.00	44.97	7.983.667.205.00	93.11
Grand Total		59.588.970.338.00	10.337.355.618.00	17.35	27.199.156.393.00	45.64	39.156.331.774.00	65.71	56.080.069.583.00	94.11



Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
Periode 2018 - 2022
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	1.1	Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan	%	80	88,68	110.00	1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.145.249.800,-	2.049.446.045,-	95.53
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						110.00		TOTAL PER SASARAN	2.145.249.800,-	2.049.446.045,-	95.53	
TINGKAT EFISIENSI 14.47 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 115.14 %												
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	0	0.00	2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.869.306.638,-	46.046.956.333,-	94.22
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							0.00	TOTAL PER SASARAN	48.869.306.638,-	46.046.956.333,-	94.22	
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.1	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sangat Tinggi	0	0.00	3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.574.413.900,-	7.983.667.205,-	93.11
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							0.00	TOTAL PER SASARAN	8.574.413.900,-	7.983.667.205,-	93.11	
TOTAL KESELURUHAN									59.588.970.338,-	56.080.069.583,-	94.11	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 (satu) yaitu “Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan” terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu “Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan” nilai 110.00 %
- Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien” terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi “ dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 3 (tiga) yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator “Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan nilai 0.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 59.588.970.338,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.080.069.583,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.508.900.755,-.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 (satu) yaitu “Meningkatnya Kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan” terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu “Persentase kebijakan Strategis dibidang Perekonomian dan Pembangunan dengan” nilai 88,68 % dari target akhir RPJMD yaitu 100%. Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 2021 Bagian Perekonomian telah melaksanakan Rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Limau Kunci Kab. Lam-Bar telah selesai dilaksanakan dan Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat.
 2. Petugas survei dan Penginput data harga komoditi Pasar (SIHK) setiap minggunya melaporkan hasil survei yang dilaksanakan di setiap kecamatan.
 3. Di Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan hasil pendataan lapangan sampai dengan Desember Tahun 2021, Jumlah Data Pelaku ekonomi tercatat sebanyak 6.672 Pelaku Ekonomi.
- Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien” terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi “ dengan nilai 100 % Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B/422/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 Perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019 bahwa Kabupaten Lampung Barat mendapatkan hasil yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 adalah 54,25 atau kategori “CC” termasuk dalam kategori Sangat Baik;



- Sasaran 3 (tiga) yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator “Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan nilai 100 % atas pencapaian dengan Skor 3,3059 dan Status Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.56.080.069.583,- (lima puluh enam milyar delapan puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan realisasi pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah 94,11 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat sudah cukup baik namun perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, 4 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640830 198403 1 001